

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Kenya adalah salah satu dari banyaknya negara Afrika yang masih harus berjuang untuk menjaga keamanan pangannya. Ancaman rawan pangan yang dihadapi Kenya pada dasarnya dipengaruhi oleh aspek ekonomi dan politik, yang memiliki hambatan-hambatan seperti masalah tata kelola pemerintahan yang kurang baik, ketidakstabilan politik, infrastruktur yang kurang memadai, rendahnya tingkat keamanan karena tingginya tindak kriminal, dan lain sebagainya. Namun, lebih sederhananya kerawanan pangan di Kenya dapat diidentifikasi oleh dorongan dari lima faktor, yang diantaranya adalah (1) masalah populasi yang semakin meningkat sebagai akibat dari laju pertumbuhan penduduk dan masuknya para pengungsi dari negara tetangga; (2) masalah kemiskinan yang mempengaruhi daya beli dan konsumsi pangan bagi masyarakat; (3) konflik dan aksi kekerasan yang rentan terjadi; (4) masalah iklim, bencana alam dan pengelolaan lingkungan yang buruk, berupa kekeringan, banjir, tanah longsor, serangan kawanan belalang gurun, hingga penurunan kualitas air dan kelestarian lingkungan hijau; dan (5) hadirnya pandemi Covid-19 yang memperparah kerawanan pangan di Kenya.

Mengingat bahwa sektor pertanian memainkan peran penting bagi ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi Kenya, maka perlu adanya pengembangan yang dilakukan untuk dapat meningkatkan produktivitas pertanian yang mampu menjamin ketersediaan pangan dan menjadi pendorong dalam mengentaskan kemiskinan di Kenya. Untuk itu, pemerintah Kenya pada tahun 2010 mengadopsi kerangka kebijakan yang dinamakan *Comprehensive Africa Agriculture Development Programme* atau yang disingkat CAADP untuk mendorong pembangunan yang berbasis pada sektor

pertanian dengan mengusahakan penelitian dan inovasi pertanian untuk berkontribusi secara efektif terhadap ketahanan pangan dan gizi, mendorong peningkatan ekonomi, serta memitigasi iklim.

Berbagai dokumen kebijakan, institusi dan undang-undang yang akan mengarah pada pembangunan sektor pertanian seperti yang dicita-citakan oleh Kenya dan para kepala negara lainnya dalam KTT Uni Afrika, khususnya pada Deklarasi Malabo tahun 2014, diatur dan disesuaikan sebagai langkah awal untuk diimplementasikan. Hal ini diperlukan untuk mewujudkan pengentasan kemiskinan di kalangan masyarakat pedesaan, membuka peluang pendapatan, pertumbuhan ekonomi, pemenuhan prinsip-prinsip keadilan sosial serta menjamin kebebasan dari kelaparan sebagaimana yang telah diatur dalam kesepakatan.

Setelah diratifikasi dan diadopsinya CAADP, Kenya mulai menyusun tinjauan teknis *National Agriculture Investment Plan (NAIP)* dan kemudian dilanjutkan dengan pengimplementasian kerangka kerja CAADP. Sejauh ini, implementasi CAADP di Kenya yang berhasil dilaksanakan, diantaranya adalah pertama, melaksanakan *Agricultural Technical Vocational Education and Training (ATVET)* seperti melakukan pelatihan bagi para petani yang kurang terampil dan mengembangkan modul pelatihan sebagai bahan pengajaran; kedua, menekankan dan memperhatikan perempuan di ATVET untuk mendorong sistem pertanian yang lebih transformatif gender; ketiga *Partnership Platform* yang berupa dialog pembelajaran bersama dalam parlemen untuk membahas transformasi dan akuntabilitas di sektor pertanian; keempat menjalankan *African Peer Review Mechanism (APRM) Vision Youth Kenya* sebagai program untuk membangkitkan sektor pertanian; kelima ikut serta dalam program *Common African Agro-Parks (CAAPs)* yang ditujukan untuk memudahkan dan melancarkan perdagangan intra Afrika untuk komoditas pertanian dan jasa. Selain lima hal tersebut, penerapan CAADP di Kenya juga telah mengorientasikan perubahan iklim kedalam

NAIP dan penelitian untuk pertanian cerdas iklim di Kenya juga terus diupayakan perkembangannya.

Namun, penerapan dan pengimplementasian CAADP di Kenya belum berdampak positif untuk menguatkan keamanan pangan di Kenya. Hal ini dilihat berdasarkan pengaruh kelembagaan politik Kenya yang masih bermasalah. Berdasarkan pendekatan institusional, kebijakan politik memiliki kesesuaian secara linear atau berbanding lurus terhadap kebijakan ekonomi dan pembangunan yang ada. Maksudnya, untuk mencapai tujuan pembangunan, perlu adanya keselarasan antara kebijakan politik dan ekonomi. Namun, yang ditemukan adalah program CAADP yang ditujukan untuk pembangunan sektor ekonomi melalui pertanian dan penguatan keamanan pangan masih belum tercapai karena dipengaruhi oleh aspek-aspek kelembagaan yang terganggu dan belum mumpuni, seperti partisipasi publik yang terbatas dan terkotakan berdasarkan etnisitas sehingga terjadi polarisasi etnis, dan transparansi yang rendah sehingga menjadi peluang untuk melestarikan para koruptor Kenya.

Kedepannya, pemangku kebijakan harus memastikan koordinasi, akuntabilitas dan kepatuhan serta memobilisasi sumber daya untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan mengatasi kerawanan pangan di Kenya. Konkretnya negara dalam hal ini pemerintah Kenya adalah pemegang kunci yang harus bertanggung jawab atas keberhasilan implementasi CAADP. Dalam konteks ini, pemerintah Kenya belum mampu membenahi problematika sistem politiknya dan kurang memprioritaskan program pembangunan untuk memastikan keberhasilan CAADP di Kenya, yang pada akhirnya implementasi CAADP di Kenya tidak memiliki pengaruh terhadap peningkatan sistem pangan yang tangguh dan mewujudkan keamanan pangan di Kenya.

## 5.2. Saran

Dalam pengimplementasiannya, CAADP harus mentransformasikan komitmen politik yang tertuang dalam Deklarasi Malabo 2014 menjadi

tindakan kebijakan nyata. Untuk itu, CAADP di Kenya memerlukan adanya: (1) perwujudan kepemimpinan pemerintahan yang efektif dan bertanggung jawab dalam memantau setiap pelaksanaan program dan implementasi kerangka kerja; (2) peningkatan kemitraan antara pemangku kebijakan dengan publik dan swasta dalam upaya mengekang kelaparan dan kerawanan pangan; (3) konsistensi dengan komitmen kebijakan untuk peduli terhadap lingkungan dan iklim, karena meskipun Kenya telah memasukkan isu-isu lingkungan dan cerdas iklim dalam NAIP, masih ditemukan penggunaan dan pengembangan rumah kaca, yang mana hal ini dapat memicu pemanasan global; (4) melakukan pendekatan kebijakan yang komprehensif dan jelas diantara semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam mendukung peningkatan produktivitas pertanian dan keamanan pangan; dan (5) penciptaan mekanisme yang efektif untuk memastikan kelangsungan rantai pasokan makanan tetap terjaga, termasuk juga dengan menyediakan makanan padat nutrisi di daerah pedesaan Kenya.

Lebih lanjut, uraian implementasi CAADP di Kenya dan analisis pengaruhnya terhadap ketahanan pangan Kenya dapat menjadi informasi atau pengetahuan baru untuk penelitian selanjutnya di masa depan yang berkenan membahas lebih jauh terkait CAADP, yang dapat dikembangkan dan diperluas. Misalnya terkait hal-hal yang perlu dievaluasi dari pengimplementasian CAADP di Kenya dengan menggunakan pandangan atau perspektif yang berbeda, atau dapat pula untuk mengukur kinerja CAADP di level regional seperti kawasan Afrika Timur ataupun tingkat kontinental yang mencakup keseluruhan Afrika.